

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Objek Penelitian

Wyata Guna Bandung didirikan pada tanggal 6 Agustus 1901 oleh Dr. Ch. A. Westhoff seorang dokter ahli mata asal Belanda. Pada tahun 1979 berdasarkan SK Menteri Sosial, Wyata Guna merupakan unit pelaksanaan Teknis Kanwil Departemen Sosial Profinsi Jawa Barat dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) yang diubah menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna pada tahun 1994. PSBN Wyata Guna ini berada dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI dengan kasifikasi Tipe A berdasarkan Kepmensos nomor 59/HUK/2003 tanggal 13 Juli 2013. Dan Pada tahun 2019 PSBN Wyata Guna Bandung berubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna Bandung.



Gambar 1.1. Logo Kementerian Sosial R.I

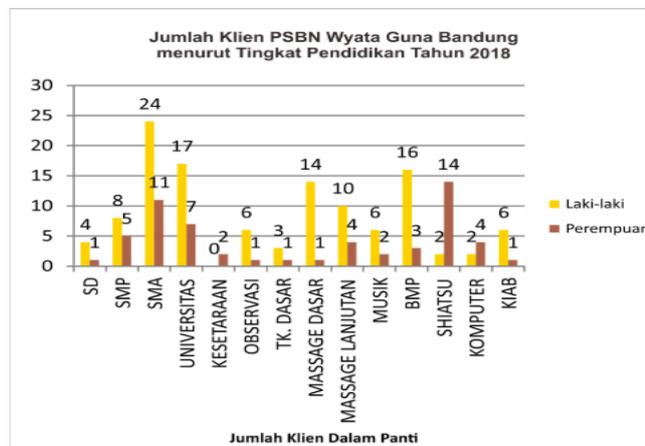
Sumber: PSBN Wyata Guna, 2018

Dikutip dari *website* PSBN Wyata Guna (2018), yang sekarang mempunyai nama BRSPDSN Wyata Guna Bandung, mempunyai visi menjadi pusat rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang disabilitas netra unggulan di Indonesia. Sementara misi dari BRSPDSN Wyata Guna adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pusat rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas netra.

2. Meningkatkan kualitas rehabilitas dan perlindungan disabilitas sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi.
3. Meningkatkan perencanaan program rehabilitasi dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
4. Megoptimalkan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi visi dan misi dari BRSPDSN Wyata Guna, maka bermacam-macam program pelajaran yang ditawarkan. Seperti dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2. Jumlah Siswa PSBN Wyata Guna Bandung menurut tingkat Pendidikan Tahun 2018.

Sumber: [PSBN Wyata Guna, 2018](#).

Melalui gambar 1.2. diketahui terdapat 2 jenis pendidikan pada BRSPDSN wyata guna bandung, yaitu pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal berupa SD, SMP, SMA, Universitas, dan kesetaraan. Sedangkan pendidikan informal berupa observasi, TK Dasar, Massage Dasar, Massage Lanjutan, Musik, BMP, Shiatsu, Computer, dan KIAB. Penelitian ini terfokus pada pendidikan Informal. Dengan jumlah siswa (Penerima Manfaat) dalam panti sebanyak 175 orang. Jumlah siswa laki-laki sebanyak 129 orang dan perempuan sebanyak 46 orang. Dapat diketahui bahwa siswa yang memilih kelas *massage* dasar sebanyak 15 orang, *massage* lanjutan sebanyak 14 orang, BMP sebanyak 19 orang, dan shiatsu sebanyak 16 orang yang mana total dari siswa yang mempunyai minat *massage* sebanyak 64 orang.

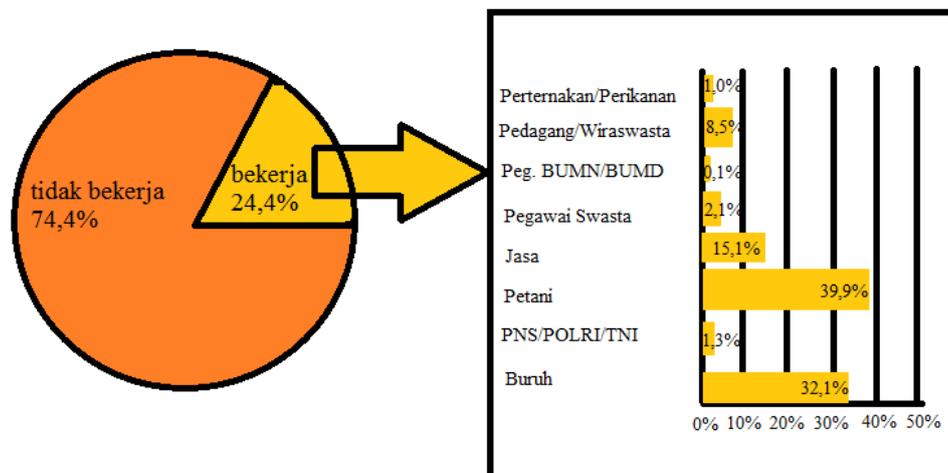
1.2. Latar Belakang.

Sekarang ini sulitnya mencari pekerjaan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat biasa, dan mengingat Indonesia memiliki beberapa penduduk yang berkebutuhan khusus maka pemerintah juga perlu menggagas masyarakat disabilitas yang ada di Indonesia. Menurut Tohari (2014), salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu oleh sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya negara menjadi *provider* sekaligus pelindung bagi hak-hak semua warga negara yang dimilikinya. Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak terkecuali para penyandang disabilitas, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat biasa. Contohnya seperti mempunyai pekerjaan.

Berdasarkan data dari WHO (*World Health Organisation*) tahun 2012, bahwa terdapat angka 15% Penyandang Disabilitas di Indonesia. Yang mana terdapat populasi mencapai 36.841.956 dengan populasi keseluruhan penduduk 245 juta. Meski demikian data yang lebih tepat belum dapat dipastikan, karena tak jarang keluarga dari penyandang disabilitas sering menyembunyikan anggotanya yang mempunyai kebutuhan khusus untuk menghindari rasa malu atau menganggapnya sebagai “aib” bagi citra keluarga (Tohari, 2014).

Masyarakat masih berfikir bahwa memiliki keluarga berkebutuhan khusus merupakan sebuah aib yang harus ditutupi, adalah sebuah contoh kecil bagaimana “disabilitas” dipandang berbeda dalam masyarakat. Kata-kata “disabilitas” pula memiliki makna yang sangat melekat dengan keterbatasan fisik maupun mental. Pengakuan secara tidak langsung masyarakat terhadap hal tersebut akan menyebabkan sebuah hambatan untuk para penyandang disabilitas berkembang dan mendapatkan haknya (Irwanto dkk, 2010).

Dengan banyaknya jumlah disabilitas dan pandangan yang negatif terhadap kelompok ini, seperti yang telah dijelaskan diatas maka seharusnya pekerjaan untuk disabilitas lebih banyak diciptakan. Adapun hasil survey ICF di 14 profinsi pada Marjuki (2010) dalam Irwanto dkk (2010) menunjukkan bahwa sebagian besar dari penyandang disabilitas tidak bekerja:



Gambar 1.3. Jenis Pekerjaan Disabilitas dalam Survey ICF

Sumber: Marjuki (2010) dalam Irwanto dkk (2010).

Walaupun berdasarkan gambar 1.3. dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas yang tidak bekerja sebanyak 74,4% dan penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 24,4%. Diketahui pula penyandang disabilitas yang bekerja, sebagian besar bekerja sebagai petani dengan presentase 39,9% dan buruh dengan presentase 32,1%.

Sejak berdiri pada tahun 2015, kerjabilitas yang mana sebuah *website* untuk masyarakat disabilitas mencari kerja, diketahui sedikitnya dari 7000 orang yang mendaftar pekerjaan, hanya 1000 orang yang diterima perusahaan. Menyangkut isu ini, pemerintah telah membuat beberapa Undang-Undang dan Peraturan mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas (Artharini, 2017).

Menurut UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, mewajibkan penyedia kerja memberikan kuota satu persen bagi disabel sebagai bagian dari tenaga kerja mereka dan kemudian diperkuat dengan UU Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 2016 yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara mempekerjakan disabel paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerjanya. Namun hal ini masih jarang ditemui di perusahaan (Artharini, 2017). Akan tetapi menurut Irwanto dkk (2010) Kebijakan ketenaga kerjaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan instrument HAM yang dijelaskan pada Pasal 27 dalam CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang menyatakan bahwa

penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja seperti warga negara lainnya. Tampaknya, yang diperlukan adalah upaya nyata untuk mengimplementasikan UU tersebut dengan insentif yang jelas.

Dijelaskan oleh Irwanto dkk (2010) pada tulisan yang berjudul Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah *Desk-Review*, untuk memenuhi hak-hak para disabilitas terdapat 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa panti dan 2 Balai Besar yang merupakan pusat / lembaga pelayanan dan rehabilitasi yang melayani penyandang disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit kronis, mental retardasi, mental eks psikotik yang langsung pengelolannya berada dibawah Kementerian Sosial, yaitu:

Table 1.1. Jumlah Panti Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

No	Jenis Permasalahan	Nama Panti/ UPT	Jumlah
1	Paca Tunanetra.	PS Bina Netra dan Balai Braile Abiyoso.	5
2	Paca Rungu Wicara.	PS Bina Rungu Wicara.	2
3	Paca Tubuh.	PS Bina Daksa dan Balai Besar Dr.Soeharso.	6
4	Paca Grahita.	PS Bina Grahita dan Balai Besar Kartini.	3
5	Paca Psikotik.	PS Bina Laras.	3
6	Paca Lara Kronis.	PS BL Kronis.	1
7	BBRVBD.	Cibinong	1
	Jumlah		21

Sumber: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 2010 dalam Irwanto dkk (2010)

Salah satu disabilitas yang termasuk sulit untuk mencari pekerjaan adalah Tunanetra. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan bahwa Tunanetra adalah tidak dapat melihat/buta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Dijelaskan oleh Sunaryo (2016) Jumlah penyandang tunanetra di Indonesia hingga saat ini mencapai 3.750.000 orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah total penduduk 250 juta jiwa.

Untuk memenuhi hak-hak tunanetra terdapat pusat atau lembaga pelayanan dan rehabilitasi Tunanetra di beberapa daerah. Untuk daerah Jawa Barat berpusat di Bandung tepatnya pada Jl. Pajajaran No.52, Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40172 yaitu Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung. Balai rehabilitasi sosial ini menawarkan beberapa aktifitas yang nantinya akan diharapkan untuk penyandang tunanetra dapat melakukan sesuatu secara mandiri.

Didukung oleh Data Penyaluran Penerima Manfaat PSBN Wyata Guna yang Disalurkan Tahun 2014-2018 yang dokumentasikan dengan pihak BRSPDSN Wyata Guna Bandung. Dijelaskan bahwa jenis penyaluran BRSPDSN yang paling banyak terjadi adalah berkerja di klinik pijat, hal ini di jelaskan pada tabel berikut:

Table 1.2. Data Penyaluran Penerima Manfaat PSBN Wyata Guna yang Disalurkan Tahun 2014-2018.

NO	JENIS PENYALURAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kerja di Klinik Pijat	36	22	36	22	22
2.	Wirawasta	18	1	10	20	25
3.	Kembali ke Orang Tua/ Pulang.	12	6	4	2	3
4.	Melanjutkan Sekolah.	2	1	-	2	-
5.	Honor/Peg. Swasta	2	-	-	2	-
6.	PNS	-	-	-	-	-
7.	Mengulang.	-	-	-	-	-
Jumlah		70	30	50	50	50

Sumber: BRSPDSN Wyata Guna Bandung, 2019

Tabel 1.2. menjelaskan bahwa penyaluran penerima manfaat atau siswa PSBN Wyata Guna Bandung atau pada tahun 2019 ini berubah nama menjadi BRSPDSN Wyata Guna Bandung, yang bekerja pada klinik pijat pada tahun 2014 sebesar 36, pada tahun 2015 sebesar 22, pada tahun 2016 sebesar 36, pada tahun 2017 sebesar 22 dan pada tahun 2018 sebesar 22 orang. Dilanjutkan oleh wirawasta pada tahun 2014 sebesar 18 orang, namun menurun drastis pada tahun 2015 hanya terdapat 1 orang, dan cenderung meningkat pada tahun 2016 sebesar 10 orang, tahun 2017 sebesar 20 orang dan 2018 sebesar 25 orang. Hal ini

membuktikan bahwa adanya minat berwiraswasta para penyandang disabilitas Tunanetra. Lalu kembali ke orang tua/pulang pada tahun 2014 sebesar 12 orang, tahun 2015 sebesar 6 orang, tahun 2016 sebesar 4 orang, tahun 2017 sebesar 2 orang dan tahun 2018 sebesar 3 orang. Begitu pula ada siswa yang melanjutkan sekolah sebesar 2 orang pada tahun 2014, 1 orang pada tahun 2015, dan 2 orang pada tahun 2017. Dan siswa yang menjadi pegawai swasta/honorer sebesar 2 orang pada tahun 2014, 2 orang pada tahun 2017.

Melalui wawancara awal yang dilakukan dengan siswa BRSPDSN Wyata Guna Bandung, diketahui bahwa para siswa akan diajarkan berbagai keterampilan. Namun bagi siswa yang ingin belajar untuk menjadi wirausaha tidak sepenuhnya didukung oleh para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan oleh data pada tabel 1.2. bagian wiraswasta sangat minim dibanding siswa yang bekerja pada klinik pijat.

Dengan adanya kasus tersebut seharusnya dapat membuka mata masyarakat untuk membantu memberikan motivasi serta peluang terhadap para penyandang tunanetra. Berbagai cara dapat dilakukan, seperti dibukanya peluang pekerjaan untuk para tunanetra, dilakukannya pelatihan, memberikan motivasi untuk membangkitkan minat dalam berwirausaha, dan serta dukungan dari pemerintah.

Namun untuk mengetahui hal tersebut dapat berhasil atau tidak, maka sebaiknya dilakukan penelitian tentang model bisnis kewirausahaan sosial atau *social entrepreneurship*. Yang mana kewirausahaan sosial itu sendiri adalah sebuah gerakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah masyarakat dalam skala besar. Gerakan ini menggunakan prinsip-prinsip seperti yang dilakukan dalam industri hanya saja tidak berorientasi pada profit namun pada “nilai sosial” (Wilson 2015 pada Rani & Teguh, 2016).

Ada berbagai model yang dapat digunakan untuk menganalisis kewirausahaan sosial, dijelaskan pada jurnal terdahulu yang berjudul Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian. Dituliskan bahwa dengan mengolah profil dari pelaku, terdapat beberapa elemen yang mendasari *social entrepreneur* yaitu *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*. Dengan

menjabarkan satu persatu dari pelaku *social entrepreneur* dapat diketahui mengapa peran dari *sosial entrepreneur* tersebut dapat mempengaruhi pembangunan perekonomian di Indonesia (Sofia, 2015). Selain itu terdapat jurnal yang menjelaskan bahwa unsur utama dari kewirausahaan sosial adalah pelaku yang kemudian disebut dengan wirausahawan, ide, peluang, dan organisasi (Light 2008 dalam Rani dan Teguh 2016). Juga pada jurnal yang ditulis oleh Littlewood & Holt (2018) menjelaskan aspek-aspek yang terdapat Gartner *framework* yaitu *social entrepreneur(s)*, *Social Enterprise*, *The Process of Social Entrepreneurship*, *Environment*.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dilakukan penelitian kepada para siswa BRSPDN Wyata Guna Bandung untuk mengetahui tingkah laku, yang nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi model kewirausahaan sosial yang tepat. Dijelaskan oleh Patel (1995) metode yang sesuai untuk mempelajari tingkah laku manusia adalah *soft system methodology*. Secara khusus *Soft System Methodology* digunakan untuk mempelajari aktivitas manusia secara terorganisir untuk mengejar tujuan atau banyak tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah model kewirausahaan sosial baru yang berguna untuk mengembangkan dan atau menciptakan sebuah bisnis yang dikhususkan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, Tunanetra yang nantinya diharapkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Oleh karenanya, judul dari penelitian ini adalah “**Identifikasi Model Kewirausahaan Sosial Menggunakan Pendekatan *Soft System Methodology* pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna.**”

1.3. Rumusan masalah.

Masyarakat Indonesia, sekiranya 15% dari masyarakat merupakan masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus salah satunya tunanetra. Dalam Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna Bandung diketahui bahwa sebagian besar siswanya mempunyai minat yang lebih untuk memijit atau *massage* karena mereka berfikir bahwa tunanetra hanya dapat mengerjakan pijit atau *massage* saja. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar lulusan BRSPDSN Wyata Guna Bandung bekerja pada panti pijat. Namun diketahui pula

bahwa pada Tahun 2016 hingga Tahun 2018 lulusan dari BRSPDSN Wyata Guna yang sebelumnya disebut dengan PSBN Wyata Guna, yang menjadi wiraswasta cenderung meningkat. Pada wawancara yang dilakukan dengan BRSPSN diketahui bahwa menjadi wiraswasta hanya bisa dicapai oleh beberapa orang saja yang mempunyai kriteria tertentu, hal ini sering terjadi karena persaingan yang semakin banyak, membuat para siswa di BRSPDSN Wyata Guna Bandung kesulitan untuk mencari pekerjaan.

1.4. Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana model kewirausahaan sosial bagi penyandang Tunanetra dengan pendekatan *soft system methodology* pada BRSPDSN Wyata Guna Bandung?

1.5. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk model kewirausahaan sosial bagi penyandang tunanetra pada BRSPDSN Wyata Guna Bandung dengan pendekatan *soft system methodology*.

1.6. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini mempunyai 2 manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu memberikan rujukan untuk model kewirausahaan sosial baru. Hasil yang diberikan, diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya dalam kewirausahaan sosial maupun *soft system methodology*.
2. Manfaat praktis, yaitu dapat digunakan bagi BRSPDSN Wyata guna bandung sebagai peningkatan potensi siswa dalam hal berwirausaha. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan berwirausaha sosial pada siswa.

1.7. Ruang Lingkup.

Penelitian ini mengidentifikasi bentuk model kewirausahaan sosial yang tepat untuk penyandang tunanetra pada BRSPDSN Wyata Guna Bandung menggunakan pendekatan *soft system methodology*. Adapun penelitian ini

dikhususkan untuk para *stakeholder* yang ada di BRSPDSN Wyata Guna Bandung. Penelitian ini menggunakan sebuah *tools* yaitu *Soft System Methodology*, yang digunakan untuk mengidentifikasi proses kewirausahaan sosial. Penelitian ini memfokuskan untuk mengidentifikasi model kewirausahaan sosial yang tepat bagi penyandang Tunanetra.

1.8. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi, maka penulisan usulan skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas secara singkat tentang objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, variabel operasional, tahap penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas karakteristik responden, analisis responden terhadap variable, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V berisi tentang kesimpulan hasil analisis dan saran dari penulis.